

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Variabel independen yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pertumbuhan Penduduk, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Upah Minimum Provinsi (UMP), secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Secara parsial dengan koefisien regresi negatif sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat. Meskipun secara tren TPAK mengalami peningkatan hingga mencapai 66.49% pada tahun 2023, ketidaksignifikanan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang aktif memasuki pasar kerja tidak mampu menjadi faktor penentu utama yang menekan atau meningkatkan angka pengangguran secara statistik. Hal ini menyiratkan adanya tantangan struktural di mana daya serap lapangan kerja di Jawa Barat belum selaras dengan laju peningkatan penawaran tenaga kerja.
3. Pertumbuhan Penduduk dengan koefisien regresi negatif yang signifikan sebesar (-4.206) ditemukan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat. Temuan ini membuktikan bahwa laju peningkatan penduduk di Jawa Barat cenderung diikuti oleh penurunan TPT. Secara teoritis, hasil ini selaras dengan pandangan Keynesian, yang mana Pertumbuhan

Penduduk bertindak sebagai stimulus utama bagi Permintaan Agregat (AD). Peningkatan AD yang dipicu oleh besarnya populasi di Jawa Barat merangsang produksi dan investasi, sehingga menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang memadai dan mampu mengimbangi laju penambahan angkatan kerja.

4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki koefisien regresi positif yang signifikan sebesar 2.727. Hasil ini menunjukkan bahwa RLS berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan RLS, yang secara konsisten terjadi selama periode penelitian, justru berkorelasi dengan peningkatan TPT. Fenomena ini mengindikasikan adanya Pengangguran Terdidik (*Educated Unemployment*) atau ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*). Lulusan dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki ekspektasi upah dan jenis pekerjaan tertentu, dan mereka cenderung memilih untuk menjadi pengangguran terbuka (aktif mencari) daripada menerima pekerjaan yang tidak sesuai kualifikasi atau berupah rendah
5. Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki koefisien regresi negatif yang signifikan sebesar (-3.57) dan ditemukan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan UMP cenderung diikuti oleh penurunan TPT. Temuan ini sangat kuat mendukung Teori Keynesian, yang menyatakan bahwa peningkatan upah minimum bertindak sebagai instrumen kebijakan yang berhasil meningkatkan

daya beli dan Permintaan Agregat (AD) masyarakat. Peningkatan AD kemudian menstimulasi pertumbuhan sektor produksi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga kebijakan UMP efektif dalam menekan angka pengangguran terbuka di Jawa Barat. UMP juga merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan secara parsial di antara seluruh variabel independen yang diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah: Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memprioritaskan kebijakan yang menargetkan akar masalah struktural Pengangguran Terdidik. Pemerintah perlu mereorientasi kurikulum pendidikan vokasi dan formal agar selaras dengan kebutuhan industri riil untuk mengatasi temuan RLS yang berpengaruh positif terhadap TPT. Selain itu, Pemerintah harus mempertahankan UMP sebagai instrumen kebijakan yang efektif dan signifikan dalam menekan TPT (sesuai Teori Keynesian), sambil terus mendorong investasi untuk memaksimalkan daya serap angkatan kerja dan menjadikan kenaikan TPAK lebih signifikan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengatasi keterbatasan data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan ekonometrika data panel yang

mencakup seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini diperlukan untuk menganalisis heterogenitas regional secara akurat. Selain itu, peneliti disarankan untuk memperluas model dengan memasukkan variabel makroekonomi eksternal lain, seperti Investasi (PMA/PMDN), PDRB Sektoral, atau tingkat Inflasi, guna menjelaskan sisa variasi TPT (48,4%) yang tidak tercakup dalam model saat ini.